



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024 PERANGKAT DAERAH

**DISPERINDAGKOP UKM KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2023**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terminologi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sudah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan yang diatur melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang diawali dengan pembentukan tim penyusun, penelaahan rancangan awal RKPD, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, hingga pada penyempurnaan berdasarkan pada Peraturan

Bupati tentang RKPD. Selain berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, penyusunan Renja Perangkat Daerah juga mengacu pada Renja Kementerian/Lembaga terkait, serta Renja Perangkat Daerah Provinsi terkait. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2. Landasan Hukum

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

- Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang pedoman Penyusunan Renvana Kerja Pemerintah Dearah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
28. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 14);
29. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023- 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 15);
30. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 Nomor 35)

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk:

- a. Menjabarkan RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 ke dalam rencana program kegiatan prioritas Tahun 2024 yang diselaraskan dengan sasaran dan program Renja K/L Tahun 2024 dan Renja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;
- b. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah melalui penerapan anggaran berbasis kinerja.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi pedoman dalam menyusun RKA-DPA dalam Rancangan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024, yang dalam penyusunannya didahului dengan menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024;
- b. Sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan Tahun 2024;
- c. Menjadi media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun berdasarkan sistematika yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah, serta sistematika dokumen Renja Perangkat Daerah.

BAB 2 : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan

program dan kegiatan masyarakat dan atau pokok-pokok DPRD.

BAB 3 : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, serta program dan kegiatan tahun 2024.

BAB 4 :RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran RKPD.

BAB 5 : PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 disusun untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis Kabupaten Banjarnegara yang berkaitan dengan urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Urusan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah meliputi Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah, Urusan Pemerintahan Pilihan Perdagangan , Urusan Pemerintahan Pilihan Perindustrian

Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 terdiri dari 8 program 14 kegiatan dan 21 Sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.**14.550.797.376,-** dengan fokus utama pada Pembinaan terhadap pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM)/Industri Kecil Menengah (IKM) , Pembinaan terhadap Pengurus/anggota Koperasi, Rehabilitasi / Pemeliharaan Gedung Pasar , Peningkatan Jaringan Pelaku UMKM/ IKM , Pedagang Kaki Lima. Program/ kegiatan/sub kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah yang meliputi:

- a. Koperasi, usaha kecil, dan menengah
 - Masih belum optimalnya kontribusi UKM dalam struktur perekonomian daerah.
 - Terbatasnya kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya koperasi dan UMKM.
 - Masih rendahnya kemampuan UMKM untuk mengakses permodalan

- Rendahnya tanggung jawab pengurus dan pengawas sebagian koperasi untuk mematuhi ketentuan sehingga tidak melaksanakan RAT
- Minimnya koperasi yang melaksanakan kaderisasi pengurus, pengawas dan pengelola sehingga peserta yang diikutkan pelatihan orangnya yang pernah ikut pelatihan sebelumnya
- Prosedur pembubaran koperasi terlalu rumit dan membutuhkan jangka waktu yang panjang

b. Perdagangan

- pada produk yang dihasilkan
- Masih banyaknya pelaku usaha yang belum memiliki izin usaha Dengan memiliki izin usahapelaku usaha akan mendapatkan jaminan dari badan hukum yang berwenang baik dari segi bisnis ataupun aturan perundang-undangan selain itu juga akan meningkatkan kredibilitas perusahaan termasuk dalam pelaksanaan ekspor
- Kurangnya pemahaman dan pengenalan terkait informasi pasar non-tradisional
Pelaku ekspor pun bisa jadi belum memahami apa itu Negara Tujuan Ekspor (NTE) non-tradisional dan FTA. Akses informasi mungkin banyak, namun luput dari pengetahuan atau jangkauan Mereka
- Birokrasi yang terlalu panjang
Peliknya sistem birokrasi yang terlalu panjang maka semakin meperlama waktu yang diperlukan untuk melakukan kegiatan ekspor dan impor dan hal tersebut akan berdampak pada high cost bagi negara yang melakukan transaksi perdagangan. Efeknya, kepercayaan antara penjual dan pembeli akan makin menurun hingga mengurangi manfaat perdagangan internasional
- Kondisi bangunan pasar pada sebagian besar pasar rakyat perlu direvitalisasi agar tercipta pasar yang nyaman , aman dan bersih
- Status kepemilikan tanah di sebagian pasar berstatus milik Desa
- Keterbatasan anggaran untuk pemeliharaan gedung pasar

c. Perindustrian

- Kurangnya minat masyarakat untuk menjadi pelaku IKM, padahal potensi SDA melimpah
- Tingkat SDM IKM yang masih rendah dan kurangnya penguasaan terkait penggunaan teknologi.
- Kurangnya fasilitasi untuk peningkatan pertumbuhan sector industri
- Menurunnya daya beli konsumen terhadap produk IKM, sehingga berpengaruh terhadap kontinuitas produksi.

Dari 9 program, 16 kegiatan dan 25 Sub kegiatan yang dalam Renja Perangkat Daerah tersebut, program/kegiatan/sub kegiatan yang disetujui untuk dianggarkan dalam APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2022 terdiri dari 7 program 14 kegiatan dan 22 Sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 14.550.797.376,-

Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022, terjadi beberapa perubahan yang meliputi penambahan pagu, penambahan Program/kegiatan/sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Perubahan tersebut mengubah rincian dalam Renja Perangkat Daerah menjadi 9 program, 16 kegiatan, dan 25 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 18.008.726.338,- Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2022, program/kegiatan/sub kegiatan yang bertambah meliputi :

1. Program Program Pengembangan UMKM,

Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

Sub Kegiatan Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan , pemasaran, SDM serta desain teknologi

2. Program Penunjang urusan pemerintah daerah

Kegiatan Pengadaan sarana penunjang urusan pemerintah daerah

- a. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
- b. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin
- c. Sub Kegiatan Pengadaan sarana penunjang urusan pemerintah daerah

Dinamika yang terjadi selama tahun 2022 turut mempengaruhi keberhasilan pencapaian Renja Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaan APBD Tahun 2022, tercatat adanya hasil yang baik yang dikarenakan adanya pencapaian maupun pelampauan target maupun yang tidak memenuhi target.

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri, kegiatan Kegiatan Penyusunan Dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber daya Industri

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaktercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Belanja bantuan kepada UMKM Jamur Tiram RT 05 RW 06 Desa Blambangan Kec.Bawang Rp 30.000.000,-, tidak diambil disebabkan karena calon kelompok penerima belum berbadan hukum;
2. Hibah untuk penambahan modal UMKM Produk Keripik Kentang Tiga Putra Desa Batur, Kec.Batur Rp

15.000.000,-, tidak diambil disebabkan karena calon kelompok penerima tidak berbadan hukum

- b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi

Program Pengembangan UKM, Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (Umkm), Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri , Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, , Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota, sedangkan realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Melakukan tera ulang terhadap Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) di 6 pasar yang ada di Kabupaten Banjarnegara
2. Melakukan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat , Propinsi maupun Pemerintah Kabupaten dalam rangka pembinaan terhadap koperasi , pelaku UKM dan IKM di Kabupaten Banjarnegara
3. Melakukan Pemeliharaan Sarana distribusi pasar
4. Melakukan Peningkatan Jaringan Pemasaran terhadap produk UKM / IKM

Pada tahun perencanaan selanjutnya, perlu diambil kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, diantaranya:

1. Melakukan tera ulang terhadap Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) di pasar yang ada di Kabupaten Banjarnegara
2. Peningkatan Pembinaan terhadap pelaku IKM , UKM maupun koperasi
3. Memfasilitasi UKM / IKM untuk mengikuti pameran dalam rangka peningkatan jaringan pemasaran
4. Rehabilitasi Gedung Pasar / Pemeliharaan Gedung pasar.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2022 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
s.d. Tahun 2022* Kabupaten Banjarnegara

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	Urusan Koperasi Usaha Kecil Menengah									
	Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Prosentase koperasi aktif	47.74 %	47 %	-	-	-	47%	47%	100

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah Keanggotaanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase koperasi aktif								
	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang memenuhi Peraturan Perundang – Undangan Kewenangan Kabupaten Kota	121 unit	120 koperasi	-	-	-	136 koperasi	136 koperasi	100
	Program penilaian kesehatan ksp/usp koperasi	Prosentase koperasi (ksp / usp) penkesnya bernilai cukup	17,87 %	13,96%	-	-	-	16.75%	16.75%	100

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi yang dapat menilai kesehatan KSP/USPnya serta untuk mengetahui kategori sehat atau tidak sehat	75 koperasi	30 koperasi	-	-	-	120 koperasi	120 koperasi	100
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	75 koperasi	30 koperasi	-	-	-	120 koperasi	120 koperasi	100
	Program pendidikan dan latihan perkoperasian	Prosentase pengurus dan karyawan koperasi yang mengikuti pelatihan	7.35 %	7,12%	-	-	-	7,30%	7,30%	100

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mengikuti Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	5 koperasi	35 koperasi	-	-	-	120 unit	120 unit	100
	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta kapasitas dan kopentesi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	5 koperasi	35 koperasi	-	-	-	120 unit	120 unit	100
	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Prosentase pemberdayaan dan perlindungan koperasi	8,5 %	7,12%				8%	8%	100
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mengikuti seminar Harkop	137 unit		30 unit	30 unit	100	50 UMKM	50 UMKM	100

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi	Jumlah koperasi yang berpartisipasi dalam peringatan Hari Koperasi		30 Koperasi	30 Koperasi	30 Koperasi	100	50 UMKM	50 UMKM	100
	Program pemberdayaan usaha menengah usaha kecil dan usaha mikro (umkm)	Meningkatnya wirausaha yang mandiri	89,57 %	89,29%	100%	100%	100	89,48%	89,48%	100
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan,	Prosentase jumlah UMKM yang mendapat fasilitas hak produk	-	-	-	-	-	2,74 %	2,74 %	100

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan									
	Pemberdayaan Melalui kemitraan usaha mikro	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	25 Unit	100 UMKM	15 unit	15 unit	100	114 Unit	114 Unit	100
	Fasilitas Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang telah mendapatkan perizinan	90 Unit	13 Unit	-	-		25 Unit	25 Unit	100
	Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro	Jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro	85 unit					27 unit	27 unit	100

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	Program pengembangan umkm	Peningkatan kapasitas sumberdaya ukm	99.2 %	99,18				99.19%	99.19%	100
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Prosentase peningkatan jumlah UMKM						1.7 %	1.7%	100
	Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain Dan Teknologi	Jumlah UMKM yang mengikuti Pelatihan	150 unit	24 UMKM	150 unit	150 Unit	100	410 unit	410 unit	100
	Urusan Pilihan Perdagangan									
	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Prosentase pasar dalam kondisi baik	16 %	8%	4%	4%	100	12%	12%	100

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/ 6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/ 4
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Prosentase jumlah pasar yang direhab								
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar yang terpelihara		6 unit	12 pasar	12 pasar	100	10 pasar	10 pasar	100
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar yang tergolong baik	21 pasar	21 pasar	21 pasar	21 pasar	100	23 unit	23 unit	100
	Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah pembinaan terhadap pedagang kaki lima		75 PKL	25 Pkl	25 PKL	100	60 PKL	60 PKL	100
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdangan	1 Dokumen	1 dokume n	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7 +9	(11)=10/ 4
	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase jumlah komoditi barang kebutuhan pokok dan barang penting yang tersedia	%	-	-	-	-	80 %	80%	100
	Kegiatan Pengendalian stock barang kebutuhan pokok penting dan ditingkat pasar kabupaten / kota	Jumlah komoditi barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terpantau	31 Jenis	31 Jenis	-	-	-	31 Jenis	31 Jenis	100
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pe-mantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabu-paten/Kota	12 laporan	-	-	-	-	12 laporan	12 laporan	100

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7 +9	(11)=10/ 4
	Kegiatan pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi ditingkat daerah kabupaten / kota	Jumlah distributor penyalur pupuk dan pestisida bersubsidi yang teraasi		-	-	-	-	-		
	Sub kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	1 laporan	-	-	-	-	-	1 laporan	1 laporan
	Program Pengembangan ekspor	Meningkatnya pelaksanaan	5%	-	-	-	-	5%	5%	100

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7 +9	(11)=10/ 4
		pengembangan dan pelatihan ekspor dan import								
	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah UKM yang mampu mengembang- kan usaha ekspor unggulan yang terdapat dalam satu (1) Daerah Kabupaten /Kota			-	-	-	30 orang	30 orang	100
	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan ekspor	40 orang	15 Orang	-	-	-	30 orang	30 orang	100
	Program standarisasi dan perlindungan konsumen	Persentase Jml UTTP yang mendapat fasilitas Tera/ tera Ulang	90 %	86,33%	86,33%	87%	101	88%	88%	100

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7 +9	(11)=10/ 4
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	Prosentase pemilik alat UTTP yang mendapat fasilitas metrology legal	90 %	86,33%	86,33%	87%	101	88%	88%	100
	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah pemilik UTTP yang mendapatkan fasilitas metrologi legal	3.591 unit	3.356 alat UTTP	3.887 UTTP	4.669 UTTP	120	3.500 UTTP	3.500 UTTP	100
	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	897 orang	-	100 orang	100 orang	100	800 orang	800 orang	100
	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase penyelenggara n promosi perdagangan	100%	-	100%	100 %		100%	100%	100
	Pelaksanaan Promosi Pemasa	Jumlah UKM yang melaksanakan	150 orang	50 orang	109 orang	109 orang	100	100 orang	100 orang	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	promosi ,kemitraan pemasaran dan penggunaan produk dalam negeri di tingkat Kabupaten/Kot a								
	Pelaksanaan Promosi Pngunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UKM yang melaksanakan promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat Kabupaten/Kot a	150 UMKM	10 UMKM	109 orang	109 oran g	100	50 UMKM	50 UMKM	100
	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UKM yang melakukan pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan Retail, Marketplace	50 UMKM	5 UMKM	-	-	-	50 UMKM	50 UMKM	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		, Perhotelan dan Akomodasi								
	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100
	Urusan Pilihan Perindustrian									
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Prosentase pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase penyusunan dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	4 dokumen	-	-	-	4 dokumen	4 dokumen	100

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100	4 dokumen	4 dokumen	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase penyusunan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan yang terbayar Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	100
	Pelaksanaan Penatausahaan dan	Jumlah Dokumen	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/ 4
	Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Penatausa haan dan Verifikasi Keuangan SKPD								
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Peningkatan pendapatan asli daerah								
	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Retribusi Pasar untuk PAD	5.400.00 0.000	5.154.2 49.379	4.711.45 7.000	5.341.65 7.649	113,38	6.000.00 0.000	6.000.000. 000	100
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase penyusunan administrasi kepegawaia n daerah	100%	-	-	-	-	-	-	-
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan	10 orang	-	-	-	-	10 orang	10 orang	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan								
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase terlayannya administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	100	2 paket	2 paket	100
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	10 paket	10 paket	10 paket	10 paket	100	10 paket	10 paket	100
	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan akan	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	100	3 paket	3 paket	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Penggandaan yang disediakan								
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Umum Pemerintahan Daerah	Prosentase tercukupinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan jasa pelayanan Umum kantor yang disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%					12 unit	12 unit	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 unit	12 unit	12 unit	12 unit	100	12 unit	12 unit	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1 gedung	1 gedung	1 gedung	1 gedung	100	1 gedung	1 gedung	100

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Pendukung dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	100	10 Unit	10 Unit	100
	Program perencanaan dan pembangunan industri	Prosentase meningkatnya kemampuan SDM wirausaha dan tenaga kerja IKM tentang Iptek sistem produksi	0.81	0.36%	2,69	2,44	91%	3.13%	3.13%	100
	Penyusunan Dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang dibina melalui Penyusunan dan		-	-	--	-	-	158 IKM	158 IKM

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
		Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kota menengah yang berkualitas								
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kibijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaa n Kebijakan Percepatan, Pengemban gan, Penyebaran dan Perwilayaha n Industri	1 dokumen	1 dokume n	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100
	Koordinasi, Sinkronisasi dan	Jumlah Dokumen Hasil	1 dokumen	1 dokume n	1 dokumen	1 dokumen	100	3 dokumen	3 dokumen	100

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	Pelaksanaan Pembanguna Sumber Daya Industri	Koordinasi, Sinkronisasi , dan pelaksanaa n Pembangun an Sumber Daya Industri								
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembanguna Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi , dan Pelaksanaa n Pembangun an Sarana dan Prasarana Industri	1 dokumen	1 dokume n	-	-	-	3 dokumen	3 dokumen	100
	Koordinasi, Sinkronisasi dan	Jumlah IKM yang dibina dengan	1 dokumen	1 dokume n	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	inovasi teknologi industri								
	Program pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota	Prosentase Prosentase peningkatan kemampuan industri kecil menengah tentang penguasaan dan pemanfaatan alih teknologi	0.53%	-	-	-	-	0.15%	0,15%	100
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan									
	Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	2 dokumen	2 dokumen	100

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam lingkup IUI,IPUI,IUK I Kewenangan Kab/Kota.								
	Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	Tersedianya informasi industri kecil menengah	95	95	95	95	100	95	95	100
	Penyediaan Informasi Industri untuk informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya informasi industri kecil menengah	95	95	95	95	100	95	95	100

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Tersedianya informasi industri kecil menengah	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	1 paket	100

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan pelayanannya, Perangkat Daerah mengampu 10 Indikator. Indikator tersebut merupakan indikator kinerja kunci dalam Laporan Pemerintah daerah dan tidak masuk dalam Renstra Perangkat Daerah , sehingga data yang tersaji merupakan realisasi pelayanan Disperindagkop UKM Kabupaten Banjarnegara.

Dalam rangka pelaksanaan pelayanan ada faktor-faktor penghambat tersebut, telah dilakukan upaya-upaya yang meliputi:

1. Pembinaan dengan peningkatan kapasitas Pelaku Usaha Industri Kecil Menengah (IKM) maupun Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
2. Memfasilitasi UMKM maupun IKM dalam pameran untuk peningkatan jaringan pemasaran
3. Rehabilitasi / Pemeliharaan Gedung pasar

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara

No	Indikator	SPM/S tandar Nasion al	IKK LPPD	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Meningkatny a Koperasi yang berkualitas	-	√	PM	PM	PM	PM	27,55	29.64	NA	NA	
2.	Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi Wirausaha	-	√	PM	PM	PM	PM	89,29	89,54	NA	NA	
3.	Bertambahny a jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten	-	√	PM	PM	PM	PM	0,33	0,53	NA	NA	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK LPPD	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4.	Persentase Pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk tutrunan indikator Pembangunan dalam RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional yang ditetapkan dalam RIPIK	-	v	PM	PM	PM	PM	23,35	30,11	NA	NA	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK LPPD	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	(Rencana Pembangunan Industri Kabupaten)	-	√	PM	PM	PM	PM			NA	NA	
5.	Prosentase Jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri kecil dan menengah yang dikeluarkan	-	√	PM	PM	PM	PM	2,25	100	NA	NA	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK LPPD	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
6.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	-	v	PM	PM	PM	PM	0	0	NA	NA	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK LPPD	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2022	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten	-	v	PM	PM	PM	PM	0	0	NA	NA	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK LPPD	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
8.	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	-	√	PM	PM	PM	PM	95	100	NA	NA	
9.	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/S IUP Toko Swalayan)	-	√	PM	PM	PM	PM	35	36,28	NA	NA	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK LPPD	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
10	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	-	√	PM	PM	PM	PM	86,33	155,63	NA	NA	

*) Kolom 3 diisi berdasarkan IKK outcome dalam lampiran Permendagri 18/2020

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya melaksanakan pelayanan urusan pemerintahan dalam 3 urusan, yaitu Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi UKM , Urusan Pilihan Perindustrian , Urusan Pilihan Perdagangan Berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan berdasarkan hasil evaluasi, isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk tahun 2024 mencakup 3 urusan tersebut. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah diantaranya adalah:

- a. Koperasi, usaha kecil, dan menengah
 1. Kualitas SDM KUMKM yang rendah, dengan latar belakang pendidikan dan pengetahuan yang sangat terbatas dan kurang berpengalaman;
 2. Pengelolaan Manajemen KUMKM yang lemah ;
 3. Produktivitas usaha rendah;
 4. Akses terhadap usaha produktif lemah yaitu : Informasi, teknologi, pasar dan pembiayaan/modal;.
 5. Keterbatasan jumlah aparatur serta kurangnya Kompetensi dari aparatur Pembina KUMKM;
 6. Rendahnya jiwa dan semangat kewirausahaan;
 7. Belum tersedia data base UMKM;
- b. Perdagangan
 1. Belum optimalnya perkembangan sektor perdagangan.
 2. Masih banyaknya lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang belum terbina.
 3. Penataan Sistem dan Sarana Distribusi Perdagangan
 4. Efektivitas Pengawasan Barang
 5. Pengaturan E-Commerce

6. Tantangan dalam Peningkatan Ekspor
 7. Diversifikasi Produk Ekspor
 8. Pengembangan Sumber Daya Manusia Sektor Perdagangan
 9. Integrasi Data mengenai Perdagangan
- c. Perindustrian
1. Pertumbuhan industri kecil dan menengah (IKM) yang lambat dan daya saing IKM yang masih rendah.
 2. Rendahnya omset penjualan produk IKM disebabkan promosi dan pemasaran produk IKM dengan memanfaatkan teknologi informasi masih kurang, serta terbatasnya fasilitasi IKM mengikuti kegiatan promosi dan pameran produk karena pandemi covid 19.
 3. Masih banyaknya pelaku usaha yang belum memiliki kemampuan tentang penguasaan dan pemanfaatan alih teknologi.
 4. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk membeli produk IKM.

Permasalahan tersebut, jika tidak diselesaikan dapat menjadi *constraint* dalam pencapaian visi dan misi Bupati maupun capaian indikator lainnya. Beberapa dampak dari adanya permasalahan dan hambatan tersebut meliputi:

1. Target Kinerja pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang diampu tidak tercapai
2. Kurang Daya saing Produk UKM , IKM dan serta koperasi sehingga pendapatannya berkurang

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi, peningkatan kualitas birokrasi, dan meningkatnya ekspektasi pemangku kepentingan pengguna layanan akan meningkatkan kebutuhan akan adanya penyediaan produk layanan yang semakin baik. Oleh karena itu, diperlukan inovasi-inovasi dalam menunjang peningkatan pelayanan publik secara kontinyu. Beberapa

tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, yaitu:

b. Tantangan

❖ Urusan Koperasi UKM

1. Koperasi dan UMKM berada di lingkungan yang terus berubah. Para pelaku KUMKM di Kabupaten Banjarnegara harus mampu mengelola perubahan itu untuk eksistensi dalam jangka panjang;
2. Peningkatan daya saing Koperasi dan UMKM, sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar dalam rangka untuk mendukung kemandirian perekonomian nasional;
3. Persoalan teknis seperti Sumber Daya Manusia, pembiayaan, pemasaran, teknologi produksi, dan kelembagaan KUMKM sangat tergantung pada kemampuan manajemen dalam membaca dan menyikapi perubahan variabel eksternal strategis yang diduga;
4. Persaingan usaha yang makin ketat dan kompetitif, sehingga dibutuhkan kreatifitas, inovasi, dan pengembangan diversifikasi produk.

❖ Urusan Perindustrian

1. Keterbatasan SDM pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kabupaten Banjarnegara, sehingga diperlukan pola pembinaan berjenjang, bertahap dan berkelanjutan;
2. Keterbatasan peralatan dan bahan baku dari Industri Kecil dan Menengah;

3. Keterbatasan narasumber yang dapat memacu iklim pertumbuhan ekonomi terutama bagi Industri Kecil Menengah;
4. Kurangnya minat masyarakat terhadap produk IKM sehingga membuat perputaran modal lambat dan kesempatan IKM memperbaiki produk sedikit;
5. Sulitnya hasil produk IKM untuk dipasarkan melalui pameran atau melalui penjualan dengan system kemitraan, sehingga diperlukan inovasi untuk memasarkan produk dengan memanfaatkan teknologi informatika;
6. Terbatasnya Akses IKM untuk mencari bahan penunjang produksi dan mencari informasi terkait pengembangan produk sehingga diperlukan pemahaman pemanfaatan teknologi dan perbaikan akses transportasi;

❖ **Urusan Perdagangan**

- Pelaku usaha kurang memahami regulasi tentang import dan eksport yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Persaingan pemasaran produk di era pasar bebas
- Pemanfaatan Gudang SRG yang belum optimal karena faktor manajemen dan masih banyak petani yang belum mau menyimpan padi/memanfaatkan gudang tersebut.
- Kurangnya koordinasi antara provinsi dan daerah.
- Sebagian besar kondisi bangunan pasar kurang representative dimana setiap tahunnya terjadi penurunan kualitas bangunan serta kurang

tertatanya pasar berakibat pada kekurangnyamanan aktivitas pasar;

- Belum memadainya pengelola pasar dalam pengurusan pasar serta belum tersedianya perangkat komputer/jaringan WiFi di masing-masing pasar sehingga berakibat kurang maksimalnya pelayanan pasar.
- Prilaku pedagang pasar yang masih kurang memahami peraturan/regulasi dan K3 (Keselamatan, Kesehatan dan Kenyamanan), yang berakibat pada minimnya kedisiplinan para pedagang dalam melaksanakan kewajiban dan menata pasar ;
- Pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat (seperti tumbuhnya pasar swalayan sampai ke desa-desa dan digitalisasi jual beli) belum bisa diimbangi dengan dinamika di pasar rakyat

c. Peluang

❖ Urusan Koperasi UKM

1. Masih banyaknya sektor usaha yang bisa digarap oleh Koperasi seperti (sektor pertanian, sektor industri) dan UMKM ;
2. Masih banyaknya sektor usaha yang bisa digarap oleh UMKM.
3. Potensi sumber daya alam dan SDM bagi KUKM belum terserap secara optimal;
4. Banyaknya promosi melalui pameran bagi KUKM;
5. Terjalannya kemitraan dalam rangka penguatan permodalan antara BUMN dan KUKM

❖ Urusan Perindustrian

1. Keterbatasan SDM IKM merupakan peluang bagi Bidang Perindustrian untuk membina IKM secara bertahap, berjenjang dan berkelanjutan;
2. Kerjasama dengan berbagai pihak (Swasta, Akademisi) untuk membina IKM terutama bantuan alat produksi dan bahan baku;
3. Pemanfaatan bahan baku lokal dan limbah untuk produk IKM yang berdaya saing;
4. Tingginya keinginan IKM untuk mengembangkan produk dan memasarkan produk.

❖ Urusan Perdagangan

1. Banyaknya promosi melalui pameran bagi KUKM
2. Banyaknya potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia bagi pengembangan KUKM yang belum tergarap secara optimal.
3. Potensi investasi yang belum terekspose melalui kegiatan Dinas Perindagkop UKM.
4. Kemitraan dengan BUMN untuk penguatan modal bagi IKM,UKM serta Koperasi
5. Tingginya keinginan masyarakat untuk berusaha
6. Merencanakan dan mengudulkan anggaran / proposal untuk kegiatan pemeliharaan / rehabilitasi serta pemenuhan sarana prasarana bangunan pasar
7. Melaksanakan pembinaan kepada pengelola pasar dan pedagang sesuai tugas pokok dan fungsi serta meningkatkan SDM pengelola pasar melalui diklat
8. Mendorong pelaksanaan program digitalisasi di pasar rakyat.

Berdasarkan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan tersebut, dapat diinventarisasi beberapa isu strategis. Inventarisasi isu-isu strategis tahun 2024 didapatkan dari hasil analisis kondisi internal dan eksternal Kabupaten Banjarnegara sampai dengan tahun 2022. Isu-isu strategis ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi, pemanfaatan potensi dan masalah keberlangsungan pembangunan. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2024, sebagai berikut:

1. Urusan Koperasi dan UKM.

- a. Kualitas SDM KUMKM yang rendah, dengan latar belakang pendidikan dan pengetahuan yang sangat terbatas dan kurang berpengalaman;
- b. Pengelolaan manajemen KUMKM yang lemah;
- c. Produktivitas usaha rendah;
- d. Akses terhadap sumber daya produktif lemah yaitu : informasi, teknologi, pasar dan pembiayaan / modal;
- e. Keterbatasan jumlah aparatur serta kurangnya kompetensi dari aparatur Pembina KUMKM;
- f. Rendahnya jiwa dan semangat kewirausahaan.

2. Urusan Perindustrian

- a. Diberlakukannya pasar bebas menuntut produk lebih bardaya saing
- b. Membuat data yang valid mengenai jumlah IKM di Kabupaten Banjarnegara memerlukan biaya yang tidak sedikit dan SDM yang bisa mengelola data;
- c. Terbatasnya SDM Apatur Sipil Negara sehingga pembinaan IKM kurang maksimal;
- d. Terbatasnya anggaran baik dari APBD Kabupaten maupun dari APBD Propinsi untuk pembinaan IKM sehingga tidak semua IKM terfasilitasi;

- e. Minimnya akses informasi maupun kegiatan dari pemerintah pusat dalam hal pembinaan IKM di Banjarnegara

3. Urusan Perdagangan

- a. Sebagian besar pasar tradisional belum memenuhi standar kesehatan dan kenyamanan pasar.
- b. Masih banyaknya lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang belum tertata.
- c. Pelaksanaan metrologi legal di daerah masih terdapat banyak kendala, antara keterbatasan SDM bidang kemetrologian yang kompeten, belum tersedianya sarana prasarana gedung dan peralatan.
- d. Kondisi bangunan pasar yang ada di Banjarnegara kurang memadai /representative
- e. Perilaku pedagang pasar yang masih kurang memperhatikan K3 (Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban Pasar
- f. Belum memadaianya Sumber Daya Manusia pengelola pasar
- g. Belum adanya regulasi lengkap yang mengatur pengelolaan pasar
- h. Tumbuhnya toko swalayan dengan cepat yang bisa mematikan pasar rakyat
- i. Database perdagangan pasar belum akurat
- j. Belum adanya fasilitas laptop/computer dan jaringan wi-fi di setiap pasar untuk mendukung kegiatan pengelolaan pasar

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Tahun merupakan pelaksanaan Tahun awal RPD Tahun 2023 -2026 , prioritas arah kebijakan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2024 meliputi:

1. Peningkatan Kapasitas bagi Pengelola Koperasi, Pelaku UMKM, Pelaku Industri melalui Pelatihan , magang untuk meningkatkan daya saing produk
2. Peningkatan Peningkatan Jaringan Pemasaran melalui fasilitasi Pelaku UMKM / IKM dalam pameran
3. Rehabilitasi / Pemeliharaan gedung pasar
4. Digitalisasi data Pelaku Usaha

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Urusan Perindustrian				14.075. 463,566					14.124.6 83,5	
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota	Kab. Banjar negara	Prosentase terlaksana nya urusan pemerintah an daerah kabupaten / kota	100%	14.785.0 00	Program Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Banjar negara	Prosentase terlaksana nya urusan pemerintah an daerah kabupaten n / kota	100%	13.8884. 663.5	
I	<i>Kegiatan Perencanaan Pengagaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Kab. Banjar negara</i>			<i>50.000</i>	<i>Kegiatan Perencanaan Pengagaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Kab. Banjar negara</i>			<i>50.000</i>	
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Banjar negara	Jumlah Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah	4 dokumen	25.000	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Banjar negara	Jumlah Dokumen Perencana an Perangkat Daerah	4 dokumen	25.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Banjar negara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 dokumen	25.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Banjar negara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 dokumen	25.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
II	<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Kab. Banjar negara</i>			<i>11.150.000</i>					<i>10.618.991,444</i>	
3	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Kab. Banjar negara	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	11.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Kab. Banjar negara	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		10.476.335,444	
4	Sub Kegiatan Pelaksanaan SKPD Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan	Kab. Banjar negara	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	12 dokumen	142.656	Sub Kegiatan Pelaksanaan SKPD	Kab. Banjar negara	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD		142.656	
III	<i>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>				<i>75.000</i>	<i>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>				<i>25.000</i>	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Banjar negara	Jumlah Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 orang	75.000	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 orang	25.000	
IV	<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>				455.000					430.000	
6	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Banjar negara	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	55.000	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Banjar negara	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	30.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabup aten Banjar negara	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediaka nkantor yang tercukupi	10 paket	200.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabup aten Banjar negara	Jumlah Paket Bahan Logistik	10 paket	200.000	
8	Sub Kegiatan Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Kabup aten Banjar negara	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggand aan yang Disediaka n	3 paket	200.000	Sub Kegiatan Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Kabup aten Banjar negara	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggand aan yang Disediaka n	3 paket	200.000	
V	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Umum Pemerintahan Daerah				2.400.00 0	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Umum Pemerintahan Daerah			2.280.67 2,056		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
9	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabup aten Banjar negara	Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Komunika si, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediaka n	12 laporan	500.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabup aten Banjar negara	Jumlah Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Komunika si, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediaka n	12 laporan	478.800	
10	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabup aten Banjar negara	Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediaka n	12 Laporan	1.900.00 0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabup aten Banjar negara	Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediaka n	12 Laporan	1.801.8 72	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
V	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				280.000					200.000	
11	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Kab.Ba njarne gara	Jumlah Paket Mebel yang Disediaka n	12 paket	110.000	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Kab.Ba njarne gara	Jumlah Paket Mebel yang Disediaka n	unit	52.980.	
12	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan mesin	Kab.Ba njarne gara	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediaka n	unit	170.000.	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan mesin	Kab.Ba njarne gara	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediaka n	8 unit	147.020	
VI	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik	Kab.Ba njarne gara			385.000					270.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
13	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab.Ba njarne gara	Jumlah Kendaraa n Peroranga n Dinas atau Kendaraa n Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarka n Pajaknya	10 kendaraaa n	220.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab.Ba njarne gara	Jumlah Kendaraa n Peroranga n Dinas atau Kendaraa n Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarka n Pajaknya	10 kendaraaa n	160.000	
14	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab.Ba njarne gara	Jumlah Sarana dan Prasarana	1 unit	100.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab.Ba njarne gara	Jumlah Sarana dan Prasarana		50.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi					Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi			
15	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Banjarnegara	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	25 unit	55.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Banjarnegara	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	25 unit	30.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
B	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri		Prosentase meningkatnya kemampuan sumber daya manusia wirausaha dan tenaga kerja industri menengah tentang Iptek sistem produksi	0.81%	605.000	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Kab. Banjar negara	Prosentase meningkatnya kemampuan sumber daya manusia wirausaha dan tenaga kerja industri menengah tentang Iptek sistem produksi	0.81%	160.000	
VII	Kegiatan Penyusunan Dan Evaluasi Rencana				605.000					160.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pembangunan Industri Kabupaten/Kota										
16	Sub Kegiatan Koordinasi , Sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri	Kab. Banjar negara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 dokumen	120.000	Koordinasi , Sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri	Kab. Banjar negara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 dokumen	30.000	
17	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan	Kab.Banjarnegara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan	1 dokumen	175.000	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan	Kab.Banjarnegara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan	1 dokumen	35.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sarana dan Prasarana Industri		Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri			Sarana dan Prasarana Industri		Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri			
18	Sub Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab.Banjarnegara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan	1 dokumen	75.000	Sub Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab.Banjarnegara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan	1 dokumen	30.000	
20	Sub Kegiatan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana	Kab.Banjarnegara	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan	1 dokumen	100.000	Sub Kegiatan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kab.Banjarnegara	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan	1 dokumen	30.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pembangunan Industri		Rencana Pembangunan Industri			Rencana Pembangunan Industri					
c,	Program Pengendalian Izin Usaha Industri		Prosentase peningkatan kemampuan industri kecil menengahkan tentang	0.20	125.000	Program Pengendalian Izin Usaha Industri		Prosentase peningkatan kemampuan industri kecil menengahkan tentang	0.20	70.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			penguasaan dan pemanfaatan alih teknologi					penguasaan dan pemanfaatan alih teknologi			
	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota				125.000	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota				70.000	
	Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi	Kab.Banjarnegara	Jumlah Dokumen Hasil	1 dokumen	125.000	Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi	Kab.Banjarnegara	Jumlah Dokumen Hasil	1 dokumen	70.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	pengawasan perijinan dibidang industri dalam lingkupIUI, IPUI,IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten / Kota		Koordinas i dan Sinkronis asi Pengawas an Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan					Koordinas i dan Sinkronis asi Pengawas an Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan			

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Industri Kewenang an Kabu paten/Kot a					Industri Kewenang an Kabupate n/Kota			
d	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional		Tersedian ya informasi industri secara lengkap dan terkini	95	200.000	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional		Jumlah Sistrm Informasi industri menenga h	95	50.00	
	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Ko ta		Jumlah Sistrm Informasi industri menengah		20.000	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota				50.00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
21	Sub Kegiatan Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Ko ta melalui SIINas	Kab.Ba njarne gara	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupate n/Kota Melalui SIINas	1 paket	50.000	Sub Kegiatan Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Kab.Ba njarne gara	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupate n/Kota Melalui SIINas	1 paket	50.000	
	Urusan Perdagangan				4.889.000	Urusan Perdagangan				2.448.542	
D	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab.Ba njarne gara	Prosentase pasar dalam kondisi baik	16%	3.050,000	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab.Ba njarne gara	Prosentase pasar dalam kondisi baik	16%	1.343.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
IX	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan sarana Distribusi Perdagangan	Kab.Banjarnegara			2.700.000					1.243.000	
22	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab.Banjarnegara	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	10 unit	2.400.000	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab.Banjarnegara	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	10 unit	990.000	
23	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan sarana Distribusi Perdagangan	Kab.Banjarnegara	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	23 unit	300.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan sarana Distribusi Perdagangan	Kab.Banjarnegara	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	23 unit	253.000	
	Kegiatan Pembinaan terhadap pengelola sarana				350.000	Kegiatan Pembinaan terhadap pengelola sarana				100.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya					distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya					
24	Sub Kegiatan Pembinaan dan pengendalian Pengelola Sarana Distribusi	Kab. Banjar negara	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 dokumen	50.000	Sub Kegiatan Pembinaan dan pengendalian Pengelola Sarana Distribusi	Kab. Banjar negara	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 dokumen	50.000	
25	Sub Kegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Banjar negara	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada	1 dokumen	50.000	Sub Kegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Banjar negara	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada	1 dokumen	50.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan					Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan			
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				650.000	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				210.000	
	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kab.Banjarnegara			650.000	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kab.Banjarnegara			210.000	
27	Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Retribusi daerah, serta penyusunan kebijakan retribusi daerah	Kab.Banjarnegara	Jumlah dokumen hasil analiliss serta pengembangan retribusi daerah dan	1 dokumen	500.000	Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Retribusi daerah, serta penyusunan kebijakan retribusi daerah	Kab.Banjarnegara	Jumlah dokumen hasil analiliss serta pengembangan retribusi daerah	1 dokumen	185.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			kebijakan retrinsi daerah					dan kebijakan retrinsi daerah			
27	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab.Ba njarne gara	Jumlah Laporan Hasil Pengolaha n, Pemeliha aan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	12 laporan	150.000	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab.Ba njarne gara	Jumlah Laporan Hasil Pengolaha n, Pemeliha aan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	12 laporan	25.000	
E	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Kab.Ba njarne gara	Prosentas e jumlah komoditi barang kebutuha n pokok dan barang penting yang tersedia	100%	160.000	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Kab.Ba njarne gara	Prosentas e jumlah komoditi barang kebutuha n pokok dan barang penting yang tersedia	100%	90.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
XII	Kegiatan Pengendalian Harga Dan Stok Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota					Harga Dan Stok Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota					
28	Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Banjar negara	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha	12 laporan	85.000	Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Banjar negara	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha	12 laporan	65.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupate n/Kota					Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupate n/Kota			
XIV	Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Ko ta				75.000	Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				25.000	
30	Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi	Kab. Banjar negara	Jumlah Laporan Pengawas an Penyalura n dan Pengguna an Pupuk dan Pestisida	1 laporan	75.000	Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi	Kab. Banjar negara	Jumlah Laporan Pengawas an Penyalura n dan Pengguna an Pupuk dan Pestisida	1 laporan	25.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Bersubsid i dengan Realisasi Minimal 90%					Bersubsid i dengan Realisasi Minimal 90%			
F	Program Pengembang an Ekspor		Prosentas e tingkat pertumbu han nilai ekspor bersih	5%	125.000	Program Pengembangan Ekspor		Prosentas e tingkat pertumbu han nilai ekspor bersih	5%	30.000	
	Kegiatan Penyelenggara an Promosi dan Misi Dagang dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah Kabupaten / Kota				125,000					30.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
31	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk ekspor	Kab.Ba njarne gara	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	30 pelaku usaha	125.000					30.000	
G	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri		Prosentas e penyelen ggaraan promosi perdagangan	100 %	725.000	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri		Prosentas e penyelen ggaraan promosi perdagangan	100 %	655.542	
XV I	Kegiatan Pelaksanaan promosi , pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri				725.000					655.542	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
32	Sub Kegiatan Pelaksanaan promosi penggunaan produk dalam negeri di Tingkat Kabupaten / Kota	Kab. Banjar negara	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten / Kota	Pelaku usaha	550.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan promosi penggunaan produk dalam negeri di Tingkat Kabupaten / Kota	Kab. Banjar negara	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten / Kota	Pelaku usaha	455.542	
33	Sub Kegiatan Pemasaran dan peningkatan sistem jaringan informasi perdagangan	Kab. Banjar negara	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui	pelaku usaha	100.000	Sub Kegiatan Pemasaran dan peningkatan sistem jaringan informasi perdagangan	Kab. Banjar negara	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui	Pelaku usaha	100.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi					Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi			
34	Sub Kegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangann	Kab. Banjar negara	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Pelaku Usaha	75.000	Sub Kegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangann	Kab. Banjar negara	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Pelaku Usaha	100.000	
H	Program Standarisasi dan Perlindungan konsumen		Prosentase alat – alat ukur , takar, timbang dan	90	179.000	Program Standarisasi dan Perlindungan konsumen		Prosentase alat – alat ukur , takar, timbang dan	90	120.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			perlengkapanannya (UTTP) bertanda tangan sah								
XV II	Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal , berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan				179.000	Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal , berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan				120.000	
35	Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal , Berupa Tera , Tera Ulang	Kab.Banejarnege	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	UTTP	109.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal , Berupa Tera , Tera Ulang	Kab.Banejarnege	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	UTTP	100.00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
36	Sub Kegiatan Pengawasan /Penyuluhan Metrologi	Kab.Ba nejarne gara	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	orang	70.000	Sub Kegiatan Pengawasan /Penyuluhan Metrologi	Kab.Ba nejarne gara	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	orang	20.000	
I	Urusan Koperasi UKM				1.025.000	Urusan Koperasi UKM				861.794,5	
	Rogram Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi		Prosentase koperasi aktif	47,74	140.000	Rogram Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi		Prosentase koperasi aktif	47,74	37.104,5	
XV III	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah Keanggotaanya				140.000					37.104,5	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	dalam Daerah Kabupaten/ Kota										
37	Sub Kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Banjar negara	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawas an Kekuatan, Kesehatan , Kemandiri an, Ketangu han, serta Akuntabili tas Koperasi Kewenang an Kabupate n/Kota	unit usaha	55.000	Sub Kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Banjar negara	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawas an Kekuatan, Kesehatan , Kemandiri an, Ketangu han, serta Akuntabili tas Koperasi Kewenang an Kabupate n/Kota	unit usaha	27.104.5	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
38	Sub Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	unit usaha	85.000	Sub Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	unit usaha	10.000	
J	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi		Prosentase koperasi yang dapat menilai kesehatannya	17,87%	85.000	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi		Prosentase koperasi yang dapat menilai kesehatannya	17,87%	13.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
XI X	Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Ko ta				85.000					13.000	
39	Sub Kegiata Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Ko ta	Kab.Ba njarne gara	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	unit usaha	85.000	Sub Kegiata Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Ba njarne gara	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	unit usaha	13.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
K	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian		Prosentase jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan Latihan perkoperasian	7,35%	70.000	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian		Prosentase jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan Latihan perkoperasian	7,35%	294.243	
XX	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaanny a dalam Daerah Kabupaten/Ko ta				70.000					294.243	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
40	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta kapasitas dan kopentesi SDM Koperasi	Kab.Ba njarne gara	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	orang	70.000	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta kapasitas dan kopentesi SDM Koperasi	Kab.Ba njarnegara	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	orang	294.243	
L	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi		Prosentase Pemberdayaan dan Perlindungan koperasi	8.5%	140.000	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi		Prosentase Pemberdayaan dan Perlindungan koperasi	8.5%	20.000	
XX I	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota				140.000	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota				20.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
41	Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Banjarnegara	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	orang	140.000	Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Banjarnegara	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	orang	20.000	
M	Program Pemberdayaan Usaha Menengah		Meningkatnya usaha mikro	89,57	440.000	Program Pemberdayaan Usaha Menengah		Meningkatnya usaha mikro	89,57	367.447	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (Umk)		yang menjadi wirausah a			Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (Umk)		yang menjadi wirausah a			
XX II	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan , Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan				440.000					367.447	
42	Sub Kegiatan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kab.Ba njarne gara	Jumlah Unit Usaha yang	unit usaha	270.000	Sub Kegiatan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kab.Ba njarne gara	Jumlah Unit Usaha yang	unit usaha	25.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Telah Menerima Pembinaa n dan Pendampi ngan Terhadap Usaha Mikro					Telah Menerima Pembinaa n dan Pendampi ngan Terhadap Usaha Mikro			
43	Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Kab.Ba njarne gara	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapat kan Perizinan	Pelaku usaha	120.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Kab.Ba njarne gara	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapat kan Perizinan	Pelaku usaha	95.000	
44	Sub Kegiatan Pemberdayaa n Kelembagaan Potensi dan	Kab.Ba njarne gara	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima	Pelaku usaha	50.000	Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan	Kab.Ba njarne gara	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima	Pelaku usaha	247.447	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengembangan Usaha Mikro		Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro			Pengembangan Usaha Mikro		Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro		247.447	
0	Program Pengembangan Umkm		Prosentase usaha mikro kecil menengah	99,2	150.000	Program Pengembangan Umkm		Prosentase usaha mikro kecil menengah	99,2	130.000	
XX	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil				150.000	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil				130.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
46	Sub Kegiatan Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain Dan Teknologi	Kab.Banjarnegara	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Unit usaha	150.000	Sub Kegiatan Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain Dan Teknologi	Kab.Banjarnegara	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Unit usaha	130.000	
Jumlah Total					21.579.000					17.435.000	

Berdasarkan rancangan awal RKPD Tahun 2024, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan yaitu:

1. Sarana dan Prasarana Dinas dan Pasar memerlukan pengadaan / pemeliharaan
2. Keterbatasan Sumber daya manusia
3. Pembinaan terhadap pelaku UKM / IKM dan koperasi perlu ditingkatkan
4. Pelaku UMKM / IKM membutuhkan fasilitasi jaringan pemasaran .

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan musrenbang kecamatan dan forum konsultasi publik telah disampaikan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui aplikasi SIPD. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1.	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri		Prosentase meningkatnya kemampuan sumber daya manusia wirausaha dan tenaga kerja industri kecil menengah tentang IPTEK sistem produksi	0.81%	
	Kegiatan Penyusunan Dan Evaluasi Rencana		Jumlah IKM yang dibina melalui	158 IKM	

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kota		
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri	Desa Wanaci pta Kec. Sigaluh	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokume n	
		Desa Pagelak, Bantar waru Kec. Maduka ra	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		
		Kelurah an Parakan canggih Kec. Banjarn egara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		
		Desa Karango ndang Kec. Karang kobar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		Desa Pandansari Kecamatan Wanaya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		
		Desa Kertayasa Kecamatan Mandiraja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Desa Kesenet Kec. Banjarmangu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	
2.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)		Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	89,57 %	
	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		Prosentase jumlah UMKM yang mendapat fasilitas hak produk	2,98%	

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besar an/ Volum e	Catatan
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Desa Cendan a Kecama tan Banjarn egara	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha mikro	50 UMKM	
		Desa Prigi Kecama tan Sigaluh			
		Desa Pagelak Kec, Maduka ra			
		Kelurah an Parakan canggih Kec, Banjarn egara			
		Desa Pawede n Kecmat an Karang kobar			
		Desa Piasa Wetan Kec. Susuka n			
		Desa Kecepit Kecama tan Punggel an			

2.6. Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Berdasarkan hasil reses anggota DPRD, melalui aplikasi SIPD telah disampaikan usulan program dan kegiatan. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Validasi
1	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pasar Wanada di	Prosentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	8.5%	Dikembalikan ke pengusul karena pasar wanada di merupakan an pasar desa sehingga bukan kewenangan Disperindagkop UKM
	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Koperasi yang berpartisipasi aktif dalam peringatan Harkop	30 Koperasi	
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	60 Koperasi	

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Validasi
	Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi				
2.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pasar Rakit	Prosentase Pemberd ayaan dan Perlindu ngan Koperasi	8.5%	Tidak diterima karena pasar rakit dan pasar lengkong tidak ada lokasi untuk membua t pasar sentra ikan
	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Koperasi yang berpartis ipasi aktif dalam peringata n Harkop	30 Koperasi	
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan		Jumlah SDM yang Memaha mi Pengetah uan UKM dan Kewiraus ahaan	60 Koperasi	
3.	Program Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	Desa Wirama stra Kec. Bawang	Presentase Usaha Mikro dan Kecil	99.20%	Tidak diterima karena kelompo k Wanita Tani bukan binan Disperin dagkop UKM

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Validasi
	Kegiatan Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil		Prosentase peningkatan jumlah UMKM	1.03	
	Sub Kegiatan Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan , pemasaran , SDM serta desain dan teknologi		Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	230 unit	
4	Program Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	Desa Kutawuluh Kec. Purwonegoro	Presentase Usaha Mikro dan Kecil	99.20%	Tidak diterima karena kerompok Wanita tanu bukan binaan Disperindagkop UKM
	Kegiatan Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil		Prosentase peningkatan jumlah UMKM	1.03	
	Sub Kegiatan Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam		Jumlah Unit Usaha Mikro	230 unit	

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Validasi
	pengembangan produksi dan pengolahan , pemasaran , SDM serta desain dan teknologi		yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi		
5	Program Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	Desa Majelengka Kec. Bawang	Presentase Usaha Mikro dan Kecil	99.20%	Tidak diterima karena kerompok Wanita tanu bukan binaan Disperindagkop UKM
	Kegiatan Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil		Prosentase peningkatan jumlah UMKM	1.03	
	Sub Kegiatan Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan , pemasaran , SDM serta desain dan teknologi		Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran,	230 unit	

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Validasi
			SDM, serta Desain dan Teknolog i		
6	Program Pemberdayaan Usaha Menenngah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Kabupa ten Banjarn egara	Meningk atnya usaha mikro yang menjadi wirausah a	89,57%	Diterima
	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		Prosent a jumlah UMKM yang mendapa t fasilitas hak produk	2,98%	
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kab.Ba najarne gara	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerim a Pembina an dan Pendamp ingan Terhadap Usaha mikro	50 Unit	

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Validasi
7	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pasar Karang kobar	Prosentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	8.5%	Di terima
	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Koperasi yang berpartisipasi aktif dalam peringatan Harkop	30 Koperasi	
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	60 Koperasi	
8	Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Kabupaten Banjarnegara	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	89,57%	Diterima
	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		Prosentase jumlah UMKM yang mendapat fasilitas hak produk	2,98%	
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi		Jumlah Unit Usaha	50 Unit	

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Validasi
	dan Pengembangan Usaha Mikro		yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha mikro		
9	Program Pemberdayaan Usaha Menenngah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Kabupate n Banjarne gara	Meningkat nya usaha mikro yang menjadi wirausaha	89,57%	
	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentin		Prosentase jumlah UMKM yang mendapat fasilitas hak produk	2,98%	
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha mikro	50 Unit	Diterima

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Validasi
10.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Kabupa ten Banjarn egara	Prosentase Pasar dalam kondisi Baik	16 %	Diterima
	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Prosentase jumlah pasar yang direhab	4%	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi		Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdaganga n	23 pasar	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tema RKP 2024 adalah "**Mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan**". Sesuai dengan tema RKP 2024 maka arah dan kebijakan RKP 2024 akan fokus pada delapan isu prioritas sebagai berikut

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020 – 2025, arah kebijakan umum pembangunan nasional pada periode jangka menengah ke-4 (Tahun 2020 – 2024) adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Disperindagkop UKM Kabupaten Banjarnegara merupakan lembaga teknis yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Kabupaten Banjarnegara “Terwujudnya Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang mandiri tangguh dan berdaya saing melalui penguatan sektor perdagangan dan perindustrian berperan utama dalam perekonomian daerah”

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, maka sasaran Rencana Kerja (Renja) Disperindagkop UKM Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1). Terwujudnya industri Kecil Menengah (IKM) Agro, IKM Aneka, Ikm olahan berbahan baku lokal dan sumber daya lokal yang mandiri berdaya saing , maju dan industri hijau
- 2). Terwujudnya iklim perdagangan yang sehat dan berdaya saing
- 3). Terwujudnya pengelolaan koperasi yang lebih baik
- 4). Terwujudnya UMKM yang mandiri dan berdaya saing
- 5). Meningkatnya Nilai Survey kepuasan masyarakat
- 6). Meningkatnya Nilai Evaluasi Sakip

3.3. Program dan Kegiatan

Tahun 2024 terdiri dari 16 Program , 24 Kegiatan dan 45 Sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 17.435.000.000 Program dan kegiatan Renja Disperindagkop UKM Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disertai dengan indikator kegiatan serta sumber adalah sebagaimana table 3.3

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Banjarnegara

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Urusan Perindustrian				13.592.030.000				15.076.453.141
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase terlaksananya Urusan Pemerin tahan Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Banjarnegara	100%	13.447.030.000	APBD			14756.453.141
	<i>Kegiatan Perencanaan Pengagaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		<i>Kab. Banjarnegara</i>		23.562.000	APBD			60.000.000
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Kab. Banjarnegara</i>	4 dokumen	0	APBD		4 dokumen	30.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Banjarnegara	4 dokumen	23.562.200	APBD		4 dokumen	30.000.000
	<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>				10.621.845.800				11.150.781.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Banjarnegara	12 bulan	10.473.189.800	APBD			11.000.992.285
	Sub Kegiatan Pelaksanaan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan	Kab. Banjarnegara	12 dokumen	148.656.000	APBD			149.788.800

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan	dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD							
	<i>Kegiatan Administrasi Kepegawaian</i>		Kab.Banjarnegara		25.000.000	APBD		1 Paket	30.000.000
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab.Banjarnegara		0	APBD		6 orang	30.000.000
	<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>				305.000.000				475.000.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan	Jumlah Paket Peralatan	Kab.Banjarnegara	2 Paket	30.000.000	APBD		2 Paket	35.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Perlengkapan Kantor	dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan							
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab.Banjarnegara	10 paket	175.000.000	APBD		10 Paket	220.000.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Banjarnegara	3 paket	100.000.000	APBD		3 Paket	220.000.000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Umum Pemerintahan Daerah				2.261.622.000	APBD			2.400.672.056
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Kab. Banjarnegara	12 laporan	450.8000.000			12 laporan	498.800.00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Air dan Listrik yang tercukupi							
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Banjarnegara	12 laporan	1.811.622.000			12 laporan	1.901.872.056
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0	APBD			220.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Banjarnegara	0				5 unit	60.000.000
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan mesin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Banjarnegara	0				8 unit	160.000.000
	Kegiatan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				235.000.000				270.000.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Banjarnegara	10 Unit	150.000.000	APBD		10 Unit	170.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Banjarnegara	1 Unit	50.000.000	APBD		1 Unit	60.000.000
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Banjarnegara	10 Unit	35.000.000			10 Unit	40.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Prosentase meningkatnya kemampuan sumber daya manusia wirausaha dan tenaga kerja IKM tentang Iptek Sistem produksi	Kab. Banjarnegara	0.81%	160.000.000			3.80%	185.000.000
	Kegiatan Penyusunan Dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Kab. Banjarnegara		100.000.000				185.000.000
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kibijakan Percepatan Pengembangan Penyebaran dan perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Kab. Banjarnegara	1 dokumen	25.000.000			1 dokumen	40.000.000
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pembanguna Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kab. Banjarnegara	1 dokumen	25.000.000			1 dokumen	35.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kab. Banjarnegara	1 dokumen	10.000.000			1 dokumen	40.000.000
	Sub Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Banjarnegara	1 dokumen	25.000.000			1 dokumen	35.000.000
	Sub Kegiatan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kab. Banjarnegara	1 dokumen	15.000.000			1 dokumen	35.000.000
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Prosentase peningkatan kemampuan ikm tentang penguasaan dan pemanfaatn alih teknologi	Kab. Banjarnegara	0,02	25.000.000				80.000.00
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI)								

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota								
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Banjarnegara	1 dokumen	25.000.000	APBD			80.000.000
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah sistem informasi industri menengah			20.000.000				55.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota				20.000.000				55.000.000
	Sub Kegiatan Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Kab. Banjarnegara	1 dokumen	20.000.000			1 dokum en	55.000.000
	Urusan Perdagangan				1.050.000.000				2.595.000.000
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Prosentase pasar dalam kondisi baik	Kab. Banjarnegara	16%	480.000.000			16%	1.270.000.000
		Prosentase jumlah pedagang kaki lima yang tersedia	Kab. Banjarnegara	80%	30.000.000			85%	110.000.000
	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan								

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan sarana Distribusi Perdagangan				480.000.000				1.270.000.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Banjarnegara	10 . unit	330.000.000	APBD		10 pasar	1.000.000.000
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Banjarnegara	23 unit	180.000.000	APBD		23 unit	270.000.000
	Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya				30.000.000				110.000.000
	Sub Kegiatan Pembinaan dan pengendalian Pengelola Sarana Distribusi	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Banjarnegara	1 dokumen	30.000.000	APBD		1 dokumen	55.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Banjarnegara		0	APBD		1 dokumen	55.000.000
	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				125.000.000				225.000.000
	Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Retribusi daerah, serta penyusunan kebijakan retribusi daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Kab. Banjarnegara	1 dokumen	125.000.000	APBD		1 dokumen	195.000.000
	Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Banjarnegara	1 dokumen	0	APBD		1 dokumen	30.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Prosentase jumlah komoditas barang kebutuhan pokok barang penting yang tersedia	Kab. Banjarnegara	85%	65.000.000				100.000.000
	Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Kab. Banjarnegara		50.000.000				70.000.000
	Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kab. Banjarnegara	12 laporan	50.000.000			12 laporan	70.000.000
	Pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat daerah kabupaten /kota		Kab. Banjarnegara		15.000.000				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi	Jumlah laporan pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi dengan realisasi minimal 90%	Kab. Banjarnegara	1 laporan	15.000.000	APBD		1 laporan	30.000.00
	Program Pengembangan Ekspor	Prosentase tingkat pertumbuhan nilai ekspor bersih perdagangan			0	APBD		5 %	35.000.000
	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah Kabupaten / Kota				0	APBD		5 %	35.000.000
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	Kab. Banjarnegara	40 pelaku usaha	0	APBD		30 pelaku usaha	100.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Prosentase penyelenggara an promosi perdagangan	Kab. Banjarnegara	100%	300.000.000				720.000.000
	Sub Kegiatan Pelaksanaan promosi pengunaan produk dalam negeri di Tingkat Kabupaten / Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat	Kab.Banjarnegara	40 Pelaku usaha	270.000.000	APBD		40 Pelaku usaha	500.000.000
	Sub Kegiatan Pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri di Tingkat Kabuoaten / Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Kab.Banjarnegara	40 Pelaku usaha	30.000.000	APBD		40 Pelaku usaha	110.000.000
	Sub Kegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangann	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Kab.Banjarnegara		0	APBD		50 Pelaku Usaha	110.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal , tera ulang dan pengawasan				50.000.000				135.000.000
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal , Berupa Tera , Tera Ulang	Jumlah alat ukur , alat takar, alat timbang dan perlenkapan ditera ulang	Kab. Banjarnegara	3.591 unit	50.000.000	APBD		4.000 UTT	125.000.000
	Sub Kegiatan Pengawasan /Penyuluhan Metrologi	Jumlah Pdelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang dibina	Kab. Banjarnegara		0	APBD		500 orang	25.000.00
	Urusan Koperasi UKM				275.000.000				958.200.000
	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Prosentase koperasi aktif	Kab. Banjarnegara	47,50%	30.000.000			47,74	45.600.000
	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah Keanggotaanya dalam		Kab. Banjarnegara		30.000.000				45.600.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Daerah Kabupaten/ Kota								
	Sub Kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Banjarnegara	30 Unit Usaha	30.000.000	APBD		100 Unit Usaha	30.000.000
	Sub Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap peraturan perundang - undangan kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	Kab. Banjarnegara		0	APBD		121 Unit Usaha	15.600.000
	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usk Koperasi		Kab. Banjarnegara	75 Unit Usaha	30.000.000	APBD		75 Unit Usaha	15.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Kab. Banjarnegara	30 Unit Usaha	30.000.000			75 Unit Usaha	15.000.000
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Kab. Banjarnegara	30 Koperasi	30.000.000	APBD		75 Unit Usaha	15.000.000
	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Prosentase jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan latihan perkoperasian	Kab. Banjarnegara	7.35%	25.000.000				323.600.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Kab. Banjarnegara		25.000.000				323.600.000
	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta kapasitas dan kopentesi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Kab. Banjarnegara	30 orang	25.000.000	APBD		35 orang	323.600.000
	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Prosentase pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Kab. Banjarnegara	8.5 %	100.000.000				24.000.000
	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan		Kab. Banjarnegara		100.000.000				24.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota								
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Kab. Banjarnegara	1 unit	100.000.000	APBD		137 orang	24.000.000
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (Umkm	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	Kab. Banjarnegara	89,48%	9.115.394.750			89,48%	10.000.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan , Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		Kab. Banjarnegara		9.115.394.750				10.000.000.000
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Kab. Banjarnegara	25 unit usaha	253,851,250	APBD		65%	300.000.000
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan perizinan	Kab. Banjarnegara	-	-	APBD		35 UMKM	110.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Kab. Banjarnegara	0	8,861,543,500	APBD		30 UMKM	9.000.000.000
	Program Pengembangan Umkm			99,20%	30.000.000				150.000.000
	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil				30.000.000				150.000.000
	Sub Kegiatan Fasilitas Usaha Mikro Menjadi	Jumlah UMKM yang mendapat fasilitas Hak Produk	Kab. Banjarnegara	50 unit	30.000.000	APBD		150 unit	150.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain Dan Teknologi								
	Jumlah Total				23.972.424.750				28.349.653.141

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program pada perangkat daerah merupakan program prioritas dalam Renstra 2023 – 2026 . Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPD selanjutnya dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Pemilihan untuk masing-masing program/ kegiatan di
Sebagai berikut :

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
Kabupaten Banjarnegara

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana
	Urusan Perindustrian				13.392.030.000	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase terlaksananya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Banjarnegara	100%	13.447.030.000	APBD
	<i>Kegiatan Perencanaan Pengagaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		<i>Kab. Banjarnegara</i>		23.562.200	APBD
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Kab. Banjarnegara</i>		0	APBD

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Banjarnegara	4 dokumen	23.562.200	APBD	
	<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>				10.621.845.800		
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Banjarnegara	12 bulan	10.473.189.800	APBD	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan	Kab. Banjarnegara	12 dokumen	148.656.000	APBD	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	
	Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan	dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD					
	<i>Kegiatan Administrasi Kepegawaian</i>		Kab.Banjarnegara		0	APBD	
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab.Banjarnegara	0	0	APBD	
	<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>				305.000.000		
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan	Jumlah Paket Peralatan	Kab.Banjarnegara	2 Paket	30.000.000	APBD	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	
	Perlengkapan Kantor	dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab.Banjarnegara	10 paket	175.000.000	APBD	
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Banjarnegara	3 paket	100.000.000	APBD	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Umum Pemerintahan Daerah				2.261.622.000	APBD	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa		12 laporan	450.000.000		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	
		Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Air dan Listrik yang tercukupi					
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 laporan	1.811.622.000		
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0	APBD	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			0	APBD	
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan mesin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			0	APBD	
	Kegiatan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				235.000.000		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Banjarnegara	10 Unit	150.000.000	APBD	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Banjarnegara	1 Unit	50.000.000	APBD	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Banjarnegara	10 Unit	35.000.000		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Prosentase meningkatnya kemampuan sumber daya manusia wirausaha dan tenaga kerja IKM tentang Iptek Sistem produksi	Kab. Banjarnegara	0.81%	100.000.000		
	Kegiatan Penyusunan Dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Kab. Banjarnegara		100.000.000		
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kibijakan Percepatan Pengembangan Penyebaran dan perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Kab. Banjarnegara	1 dokumen	25.000.000		
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pembanguna Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kab. Banjarnegara	1 dokumen	25.000.000		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kab. Banjarnegara	1 dokumen	10.000.000		
	Sub Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Banjarnegara	1 dokumen	25.000.000		
	Sub Kegiatan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kab. Banjarnegara	1 dokumen	15.000.000		
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Prosentase peningkatan kemampuan ikm tentang penguasaan dan pemanfaatn alih teknologi	Kab. Banjarnegara	0,02	25.000.000		
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI)						

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	
	dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota						
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Banjarnegara	1 dokumen	25.000.000	APBD	
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah sistem informasi industri menengah			20.000.000		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	
	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota				20.000.000		
	Sub Kegiatan Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Kab. Banjarnegara	1 dokumen	20.000.000		
	Urusan Perdagangan				1.050.000.000		
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Prosentase pasar dalam kondisi baik	Kab. Banjarnegara	16%	480.000		
		Prosentase jumlah pedagang kaki lima yang tersedia	Kab. Banjarnegara	80%	30.00.000		
	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan						

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	
	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan sarana Distribusi Perdagangan				480.000.000		
	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Banjarnegara	10 . unit	300.000.000	APBD	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Banjarnegara	23 unit	180.000.000		
	Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya				30.000.000		
	Sub Kegiatan Pembinaan dan pengendalian Pengelola Sarana Distribusi	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Banjarnegara	1 dokumen	30.000.000		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Banjarnegara		0		
	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				125.000.000		
	Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Retribusi daerah, serta penyusunan kebijakan retribusi daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Kab. Banjarnegara	1 dokumen	125.000.000		
	Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Banjarnegara		0		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Prosentase jumlah komoditas barang kebutuhan pokok barang penting yang tersedia	Kab. Banjarnegara	85%	65.000.000		
	Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Kab. Banjarnegara		50.000.000		
	Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kab. Banjarnegara	12 laporan	50.000.000		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	
	Program Pengembangan Eksport	Prosentase tingkat pertumbuhan nilai eksport bersih perdagangan			0		
	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang dagang bagi produk eksport unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah Kabupaten / Kota				0		
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk eksport	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina			0		
	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Prosentase penyelenggara an promosi perdagangan		100%	300.000.000		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan promosi penggunaan produk dalam negeri di Tingkat Kabupaten / Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat	Kab.Banjarnegara	40 Pelaku usaha	270.000.000	APBD	
	Sub Kegiatan Pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri di Tingkat Kabuoaten / Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Kab.Banjarnegara	10 Pelaku usaha	30.000.000	APBD	
	Sub Kegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangann	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Kab.Banjarnegara		0	APBD	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	
	Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal , tera ulang dan pengawasan				50.000.000		
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal , Berupa Tera , Tera Ulang	Jumlah alat ukur , alat takar, alat timbang dan perlenkapan ditera ulang	Kab. Banjarnegara	3.591 unit	50.000.000	APBD	
	Sub Kegiatan Pengawasan /Penyuluhan Metrologi	Jumlah Pdelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang dibina	Kab. Banjarnegara		0	APBD	
	Urusan Koperasi UKM				275.000.000		
	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Prosentase koperasi aktif	Kab. Banjarnegara	47,50%	30.000.000		
	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah Keanggotaanya dalam		Kab. Banjarnegara		30.000.000		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	
	Daerah Kabupaten/ Kota						
	Sub Kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Banjarnegara	30 Unit Usaha	30.000.000	APBD	
	Sub Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	Kab. Banjarnegara		0	APBD	
	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi		Kab. Banjarnegara	17.87	30.000.000		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	
	Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Kab. Banjarnegara		30.000.000		
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Kab. Banjarnegara	30 Koperasi	3.000.000	APBD	
	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Prosentase jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan latihan perkoperasian	Kab. Banjarnegara	7.35%	25.000.000		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	
	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Kab. Banjarnegara		25.000.000		
	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta kapasitas dan kopentesi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Kab. Banjarnegara	30 orang	25.000.000	APBD	
	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Prosentase pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Kab. Banjarnegara	8.5 %	20.000.000		
	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan		Kab. Banjarnegara		100.000.000		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	
	Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota						
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Kab. Banjarnegara	1 unit	100.000.000	APBD	
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (Umkm	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	Kab. Banjarnegara	89,48%	9.115.394.750	DAK	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	
	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan , Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		Kab. Banjarnegara		9.115.394.750		
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Kab. Banjarnegara	25 unit usaha	253,851,250	DAK, APBD	Dak Non fisik KUKM
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan perizinan	Kab. Banjarnegara	-	-		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Kab. Banjarnegara	0	8,861,543,500	DAK, APBD	Pembangunan Gedung PLUT dan Sarprasnya
	Program Pengembangan Umkm			99,20%	30.000.000		
	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil				30.000.000		
	Sub Kegiatan Fasilitas Usaha Mikro Menjadi	Jumlah UMKM yang mendapat fasilitas Hak Produk		50 unit	130.000.000	APBD	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	
	Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain Dan Teknologi						
		Jumlah UMKM yang berijin		150 orang	75.000.000		
	Jumlah Total				23.972.424.750		

BAB V

PENUTUP

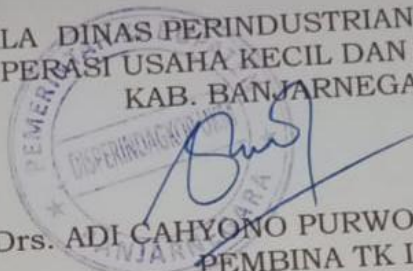
Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. Renja Perangkat Daerah selanjutnya menjadi platform operasional bagi Perangkat Daerah dalam menjalankan programnya dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka sasaran pembangunan daerah tahun 2024. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah setelah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024 dan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disepakati.
2. Kerangka pendanaan dalam Renja Perangkat Daerah masih bersifat sementara, sehingga masih dimungkinkan terjadi perubahan pagu yang disebabkan oleh pengurangan, penambahan, dan pergeseran anggaran antar program, antar kegiatan maupun antar sub kegiatan dalam kerangka penyusunan anggaran secara terpadu dan berbasis kinerja.

3. Renja Perangkat Daerah menjadi acuan bagi Kepala Perangkat Daerah dan segenap jajarannya serta pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, serta menjadi dasar dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal : 3 - 8 - 2023

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KAB. BANJARNEGARA


Drs. ADI CAHYONO PURWO SAPUTRO, M.M.
PEMBINA TK I
NIP. 19690406 198803 2 001

